

## POLITIK EKONOMI INDONESIA ERA PRABOWO : TINJAUAN LITERASI ATAS STRATEGI PENCAPAIAN PERTUMBUHAN 8% NASIONAL

Riskya Oktaviani<sup>1</sup>, Diky Hendra Pratama<sup>2</sup>, Anas Malik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden  
Intan Lampung

E-mail: [riskyaoktaviani391@gmail.com](mailto:riskyaoktaviani391@gmail.com)<sup>1</sup>, [dkyhndrpmt@gmail.com](mailto:dkyhndrpmt@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[anasmalik@radenintan.ac.id](mailto:anasmalik@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Artikel ini menganalisis strategi politik ekonomi Indonesia pada era pemerintahan Prabowo dalam upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% per tahun sebagai langkah mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kajian ini menggunakan tinjauan literatur sistematis atas publikasi ilmiah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terbaru, dengan fokus pada periode 2023-2025. Hasil studi menemukan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional memerlukan sinergi antara kebijakan hilirisasi industri, penguatan investasi domestik dan asing, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta reformasi fiskal dan birokrasi. Pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan melakukan berbagai terobosan kebijakan, namun masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan wilayah, kualitas SDM yang belum merata, birokrasi yang lambat, serta risiko akibat dinamika eksternal global. Peluang pencapaian target 8% tetap terbuka melalui perluasan investasi, inovasi kebijakan hilirisasi, dan penguatan literasi politik-ekonomi, di samping diperlukan komitmen pada pemerataan pembangunan dan pengawasan publik yang efektif. Rekomendasi utama diarahkan pada penguatan koordinasi lintas sektor, efisiensi belanja APBN, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta reformasi regulasi demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, Politik Ekonomi, Era Prabowo, Hilirisasi Industri, Reformasi Struktural, Kebijakan Fiskal, Investasi, Inklusi Kesejahteraan.

### ABSTRACT

*This article analyzes Indonesia's political economy strategies during Prabowo's administration as part of efforts to achieve a national economic growth target of 8% per year in support of the Golden Indonesia Vision 2045. The study uses a systematic literature review of academic publications, policy documents, and recent research, focusing on the 2023-2025 period. The findings indicate that accelerating national economic growth requires synergy among industrial downstreaming policies, strengthening domestic and foreign investment, improving human capital quality, as well as fiscal and bureaucratic reform. The government is judged to have successfully maintained macroeconomic stability and implemented several policy breakthroughs, yet still faces challenges of regional disparity, uneven human capital quality, bureaucratic sluggishness, and external global risks. Opportunities to attain the 8% target remain open through expanded investment, innovation in downstreaming policies, and strengthened political-economic*

### Article history

Received: November 2025  
Reviewed: November 2025  
Published: November 2025

Plagiarism checker no 1405  
Doi : prefix doi :  
10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author  
Publish by : musytari



This work is licensed under  
a creative commons  
attribution-noncommercial  
4.0 international license

*literacy, while strong commitment to equitable development and effective public oversight are essential. Key recommendations focus on enhancing cross-sectoral coordination, improving state budget efficiency, increasing the quality of education and vocational training, and regulatory reform to realize inclusive and sustainable national economic growth.*

**Keywords:** *Economic Growth, Political Economy, Prabowo Era, Industrial Downstreaming, Structural Reform, Fiscal Policy, Investment, Inclusive Welfare.*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan keluar dari perangkap negara pendapatan menengah (middle-income trap) yang selama ini menjadi ancaman stagnasi pembangunan nasional. Target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi agenda krusial untuk menjawab stagnansi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama satu dekade terakhir cenderung berada di kisaran 5% (Harefa, 2025; Pramesti dkk., 2025). Untuk mencapai status negara maju dan berdaya saing tinggi, Indonesia memerlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan berkelanjutan, serta mampu mengatasi berbagai tantangan struktural yang kompleks. Tantangan-tantangan tersebut meliputi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang meskipun telah menurun namun tetap signifikan secara absolut—terutama pasca-pandemi dengan ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkatkan angka kemiskinan (Mariana, 2025; Ahmad dkk., 2025). Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih perlu ditingkatkan secara mendasar melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguatan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 (Pradana dkk., 2025). Kesenjangan pembangunan antarwilayah, khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara Jawa dan luar Jawa, turut menjadi hambatan serius dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif yang merata (Rosi & Rizal, 2025). Oleh karena itu, target pertumbuhan ekonomi 8% menjadi keniscayaan strategis untuk membawa lompatan signifikan dalam kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, serta penguatan daya saing nasional di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian (Ilmi, 2025; Siregar, 2025).

Mencermati visi besar yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran yakni menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% per tahun timbul pertanyaan kritis mengenai kemampuan strategi politik-ekonomi yang diusung untuk benar-benar mendorong percepatan pembangunan secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Apakah kebijakan yang didorong melalui optimalisasi investasi domestik dan asing, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, akselerasi pembangunan infrastruktur, serta penguatan sumber daya manusia dapat mengatasi berbagai permasalahan laten seperti kemiskinan struktural, keterbatasan infrastruktur perdesaan, serta ketimpangan wilayah dan akses pendidikan yang selama ini menjadi penghambat utama misi pertumbuhan ekonomi tinggi? (Ahmad dkk., 2025; Rosi & Rizal, 2025; Pradana dkk., 2025). Pertanyaan ini semakin relevan bila diperhadapkan dengan situasi ekonomi global yang cenderung tidak menentu, tekanan geopolitik, dinamika harga komoditas dunia, serta tantangan transformasi struktural ekonomi nasional yang memerlukan reformasi mendalam pada sisi penawaran (supply-side) dan permintaan (demand-side) (Ilmi, 2025; Fitria, 2025). Di sisi lain, efektivitas reformasi fiskal termasuk efisiensi belanja APBN melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan realokasi anggaran menuju sektor produktif juga perlu dikaji secara kritis untuk menilai kesesuaian antara strategi yang

dicanangkan dan hasil pembangunan yang diharapkan (Suwandi & Abdullah, 2025; Pramesti dkk., 2025; Febriansyah dkk., 2025).

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah secara kritis strategi serta kebijakan yang ditempuh pada era Prabowo-Gibran dalam literatur nasional, sekaligus menilai kontribusi pendekatan tersebut terhadap kemungkinan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% per tahun. Penelaahan dilakukan berdasarkan kerangka literatur terkait politik ekonomi Indonesia, capaian kebijakan fiskal dan moneter, dinamika investasi dan hilirisasi industri, serta relevansi program prioritas yang diimplementasikan pemerintah dalam mempercepat transformasi struktural dan pembangunan inklusif (Zaman, 2025; Siregar, 2025; Ahmad, 2025). Tulisan juga bertujuan memberikan kontribusi akademik dan praktis berupa identifikasi peluang dan tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini seperti efisiensi APBN, stabilitas makroekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan masyarakat local serta analisis efektivitas intervensi kebijakan dan alternatif solusi perbaikan di masa mendatang (Pramesti dkk., 2025; Luthfi dkk., 2025; Setyawan dkk., 2025). Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perumusan kebijakan yang lebih tajam, adaptif, dan berorientasi jangka panjang guna mendukung akselerasi pembangunan, penguatan ekonomi nasional, serta peningkatan literasi politik masyarakat yang menjadi fondasi demokrasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045 (Siddiq, 2025; Harefa, 2025).

## TINJAUAN LITERATUR

Politik ekonomi merupakan pendekatan multidisipliner yang mengkaji interaksi antara kekuasaan politik dan keputusan ekonomi dalam proses pembangunan nasional, termasuk analisis bagaimana kebijakan fiskal, moneter, dan struktural mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara agregat maupun distribusi kesejahteraan antarkelompok masyarakat (Pieris, 2025; Siregar, 2025). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan pembangunan berbasis pertumbuhan tinggi menjadi paradigma dominan yang menekankan pentingnya akselerasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebagai prasyarat untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas (Ilmi, 2025; Harefa, 2025). Strategi ini memerlukan kombinasi kebijakan makroekonomi yang stabil melalui pengelolaan inflasi, nilai tukar, dan neraca pembayaran serta kebijakan struktural yang mendukung transformasi ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan tersier, termasuk hilirisasi sumber daya alam dan industrialisasi berbasis teknologi (Zaman, 2025; Fitria, 2025). Namun demikian, pendekatan pertumbuhan tinggi tidak otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan, sehingga diperlukan intervensi kebijakan fiskal yang progresif dan alokasi anggaran yang efisien untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan berkelanjutan (Febriansyah dkk., 2025; Pramesti dkk., 2025). Dalam kerangka teoretis ini, efektivitas kebijakan fiskal dan moneter sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga pemerintah, kredibilitas kebijakan, serta respons sektor swasta dan masyarakat terhadap stimulus ekonomi yang diberikan (Siregar, 2025; Suwandi & Abdullah, 2025).

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa target pertumbuhan ekonomi tinggi seperti target 8% yang dicanangkan era Prabowo memerlukan peningkatan signifikan dalam investasi domestik maupun asing, produktivitas tenaga kerja, serta inovasi teknologi untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (*middle-income trap*) yang telah dialami beberapa negara berkembang di Asia dan Amerika Latin (Ilmi, 2025; Harefa, 2025). Penelitian Ahmad dkk. (2025) menemukan bahwa investasi domestik dan asing memiliki hubungan negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia, yang menunjukkan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi, perbaikan infrastruktur, dan penguatan kepastian hukum. Namun, Mariana (2025) mengingatkan bahwa gelombang

pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat restrukturisasi industri dan otomasi teknologi dapat menjadi ancaman nyata terhadap peningkatan kemiskinan dan pengangguran jika tidak diimbangi dengan program perlindungan sosial dan pelatihan keterampilan yang memadai. Di sisi lain, kajian Fitria (2025) mengidentifikasi bahwa neraca transaksi berjalan Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika perdagangan internasional, harga komoditas global, dan kebijakan nilai tukar, sehingga stabilitas makroekonomi menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Beberapa literatur juga menekankan pentingnya literasi politik masyarakat sebagai fondasi demokrasi ekonomi yang sehat, di mana partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan dan alokasi anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan efektivitas pembangunan (Siddiq, 2025; Silalahi & Athahirah, 2025).

Pemerintahan Prabowo-Gibran mengusung sejumlah kebijakan transformatif yang diarahkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, dengan fokus utama pada hilirisasi sumber daya alam melalui pengembangan industri berbasis mineral dan energi terbarukan, industrialisasi manufaktur bernilai tambah tinggi, serta penguatan ekonomi perdesaan sebagai basis ketahanan pangan dan energi nasional (Zaman, 2025; Ahmad, 2025; Luthfi dkk., 2025). Program hilirisasi yang diatur melalui pendekatan *economic analysis of law* bertujuan untuk memaksimalkan nilai tambah domestik dan menciptakan lapangan kerja berkualitas, meskipun implementasinya menghadapi tantangan terkait kedaulatan permanen atas sumber daya alam (*permanent sovereignty over natural resources*) dan komitmen perdagangan internasional (Zaman, 2025). Dalam konteks ketahanan pangan, program seperti Brigade Pangan dan JARI TANGAN (Jaringan Tangan Petani) dirancang untuk mendorong swasembada pangan dan mengintegrasikan ketahanan pangan dengan ketahanan energi melalui pertanian berkelanjutan, meskipun Arsyad dkk. (2025) mencatat adanya tantangan struktural seperti keterbatasan teknologi, akses modal petani, dan koordinasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan program makan bergizi gratis sebagai intervensi kesehatan dan pendidikan untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas SDM generasi mendatang, meskipun Aji (2025) mempertanyakan keberlanjutan fiskal program tersebut dan mendesak evaluasi efisiensi anggaran secara berkelanjutan. Penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat desa juga menjadi strategi kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mencapai agenda *zero poverty*, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan (Setyawan dkk., 2025; Rosi & Rizal, 2025). Efisiensi belanja APBN melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 juga menjadi bagian integral dari strategi fiskal untuk memastikan alokasi anggaran lebih produktif dan tepat sasaran, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan (Suwandi & Abdullah, 2025; Pramesti dkk., 2025).

## METODO PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai literatur ilmiah terkait politik ekonomi Indonesia era Prabowo, khususnya strategi pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional 8% per tahun. Sistematisasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan publikasi ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi, disertasi, laporan kebijakan pemerintah, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik kajian, meliputi kebijakan fiskal dan moneter, investasi domestik dan asing, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan masyarakat lokal (Ilmi, 2025; Harefa, 2025; Zaman, 2025; Siregar, 2025). Proses seleksi literatur menggunakan kriteria inklusi berupa relevansi tematik, kualitas metodologis, dan aktualitas publikasi, dengan fokus utama pada literatur yang

diterbitkan antara tahun 2023-2025 untuk memastikan kebaruan data dan analisis kontekstual terhadap kondisi ekonomi terkini. Analisis isi kebijakan dilakukan secara kualitatif melalui teknik *content analysis* yang melibatkan identifikasi tema-tema utama, pola kebijakan, serta gap antara target yang ditetapkan pemerintah dan hasil capaian yang dilaporkan dalam berbagai studi empiris (Pramesti dkk., 2025; Suwandi & Abdullah, 2025; Ahmad dkk., 2025; Fitria, 2025). Pemetaan tinjauan kritis dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai penelitian untuk mengidentifikasi konsensus akademik, perdebatan teoretis, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan guna mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Arsyad dkk., 2025; Luthfi dkk., 2025; Setyawan dkk., 2025; Febriansyah dkk., 2025). Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel mampu memberikan panorama komprehensif tentang strategi politik-ekonomi era Prabowo serta implikasi teoretis dan praktisnya bagi pembangunan nasional jangka panjang (Pieris, 2025; Siddiq, 2025; Pradana dkk., 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Kebijakan Ekonomi Prabowo

Prabowonomics merupakan paradigma kebijakan ekonomi yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran dengan penekanan utama pada stabilitas makroekonomi, efisiensi birokrasi, peningkatan investasi domestik dan asing, serta percepatan hilirisasi sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah ekonomi nasional yang lebih tinggi (Harefa, 2025; Pramesti dkk., 2025). Capaian awal yang dicatat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun pertama pemerintahan mampu bertahan di level 5% lebih, yang mencerminkan keberhasilan dalam menjaga stabilitas di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, termasuk tekanan inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan ketidakpastian geopolitik (Siregar, 2025; Ilmi, 2025). Fokus utama pada stabilitas makroekonomi dilakukan melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, di mana kebijakan fiskal diarahkan untuk efisiensi belanja APBN melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sementara kebijakan moneter berupaya menjaga inflasi tetap terkendali dan nilai tukar rupiah stabil (Suwandi & Abdullah, 2025; Siregar, 2025). Reformasi birokrasi menjadi salah satu pilar penting dalam Prabowonomics untuk meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*), mengurangi hambatan regulasi, serta mempercepat perizinan investasi agar lebih kondusif bagi pelaku ekonomi (Pradana dkk., 2025). Strategi hilirisasi yang diimplementasikan melalui pendekatan *economic analysis of law* bertujuan untuk memaksimalkan kedaulatan negara atas sumber daya alam sambil tetap mematuhi komitmen perdagangan internasional, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global (Zaman, 2025; Ahmad, 2025).

Strategi pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun memerlukan peningkatan signifikan dalam akumulasi modal (*capital formation*), baik melalui investasi domestik maupun asing, dengan memperhatikan rasio *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) sebagai indikator efisiensi penggunaan modal untuk menghasilkan pertumbuhan output nasional (Harefa, 2025; Ilmi, 2025). Penelitian Ahmad dkk. (2025) menunjukkan bahwa investasi domestik dan asing memiliki hubungan negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia, yang mengindikasikan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum, infrastruktur memadai, dan insentif fiskal yang menarik bagi investor. Sektor industri manufaktur dan pertanian menjadi fokus utama alokasi investasi, mengingat kedua sektor ini memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif dan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi, terutama melalui program hilirisasi industri berbasis mineral, energi terbarukan, serta pengembangan agro-industri.

yang terintegrasi dengan ketahanan pangan nasional (Zaman, 2025; Luthfi dkk., 2025; Arsyad dkk., 2025). Reformasi struktural yang diperlukan mencakup perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan infrastruktur logistik dan digital, serta transformasi sektor pertanian dari subsisten menuju pertanian komersial dan berkelanjutan (Pradana dkk., 2025; Ahmad, 2025). Namun demikian, pencapaian target 8% sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi global, perubahan harga komoditas, dan ketegangan perdagangan internasional (Fitria, 2025; Febriansyah dkk., 2025).

Perbandingan kebijakan ekonomi era Prabowo dengan era pemerintahan sebelumnya menunjukkan beberapa kontinuitas sekaligus pergeseran prioritas, di mana era sebelumnya lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur fisik skala besar, sementara era Prabowo lebih fokus pada efisiensi fiskal, hilirisasi industri, dan penguatan ketahanan pangan-energi sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang (Pramesti dkk., 2025; Ahmad, 2025; Luthfi dkk., 2025). Kajian literatur menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi sangat bergantung pada kredibilitas pemerintah, konsistensi implementasi, serta respons sektor swasta dan masyarakat terhadap stimulus ekonomi yang diberikan, di mana koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan (Siregar, 2025; Ilmi, 2025). Pramesti dkk. (2025) menemukan bahwa efisiensi APBN era Prabowo menunjukkan tren positif berdasarkan analisis sentimen publik dan kajian ekonomi, meskipun masih terdapat tantangan terkait alokasi anggaran yang belum sepenuhnya optimal dan perlu evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Studi juga menunjukkan bahwa literasi politik masyarakat yang rendah menjadi hambatan dalam pengawasan kebijakan dan partisipasi publik, sehingga penguatan literasi politik menjadi agenda penting untuk memperkuat fondasi demokrasi ekonomi dan akuntabilitas pemerintah (Siddiq, 2025; Silalahi & Athahirah, 2025). Secara keseluruhan, meskipun capaian awal menunjukkan hasil yang cukup positif, literatur menekankan pentingnya keberlanjutan reformasi struktural, inovasi teknologi, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan target pertumbuhan 8% dapat tercapai secara inklusif dan berkelanjutan (Harefa, 2025; Pradana dkk., 2025; Setyawan dkk., 2025).

## B. Tantangan dan Potensi

Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural yang kompleks dan memerlukan intervensi kebijakan jangka panjang untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% secara berkelanjutan dan inklusif. Ketimpangan ekonomi antarwilayah terutama antara Jawa dan luar Jawa, serta antara perkotaan dan perdesaan masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan nasional, di mana infrastruktur perdesaan yang terbatas, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta keterbatasan modal dan teknologi di daerah tertinggal menjadi faktor utama yang memperlebar kesenjangan (Rosi & Rizal, 2025; Setyawan dkk., 2025). Birokrasi yang masih dianggap kompleks, lambat, dan kurang efisien menjadi hambatan serius bagi iklim investasi dan kemudahan berusaha, sehingga reformasi birokrasi yang komprehensif termasuk digitalisasi layanan publik, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan transparansi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi (Pradana dkk., 2025; Pramesti dkk., 2025). Kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya menjadi tantangan krusial, di mana sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan

industri mengakibatkan tingginya angka pengangguran terdidik dan kesenjangan keterampilan (*skill mismatch*) yang menghambat produktivitas tenaga kerja nasional (Pradana dkk., 2025; Malau dkk., 2025). Daya saing industri nasional yang stagnan akibat ketergantungan pada ekspor komoditas primer, lemahnya inovasi teknologi, serta terbatasnya akses terhadap pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi hambatan struktural yang perlu diatasi melalui strategi hilirisasi, penguatan ekosistem inovasi, dan fasilitasi akses permodalan yang lebih inklusif (Zaman, 2025; Zikri & Albeta, 2025; Ahmad dkk., 2025). Selain itu, ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat otomasi dan restrukturisasi industri berpotensi meningkatkan kemiskinan dan pengangguran jika tidak diimbangi dengan program perlindungan sosial dan *reskilling* yang memadai (Mariana, 2025).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan struktural, Indonesia memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menuju target 8% per tahun. Stabilitas makroekonomi yang terjaga dengan baik ditandai oleh inflasi yang terkendali, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, dan neraca pembayaran yang sehat memberikan fondasi yang solid bagi investor domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Siregar, 2025; Ilmi, 2025; Fitria, 2025). Peluang investasi yang luas terbuka di berbagai sektor strategis seperti hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, energi terbarukan, infrastruktur digital, agro-industri, dan pariwisata, di mana pemerintah telah memberikan sejumlah insentif fiskal dan kemudahan regulasi untuk menarik investasi yang berkualitas dan berkelanjutan (Zaman, 2025; Ahmad, 2025; Luthfi dkk., 2025). Pengelolaan fiskal yang semakin efisien melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara produktif dan tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas belanja publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (Suwandi & Abdullah, 2025; Pramesti dkk., 2025). Program prioritas pemerintah seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi melalui Brigade Pangan dan JARI TANGAN, makan bergizi gratis untuk mengatasi stunting, serta pemberdayaan masyarakat lokal merupakan intervensi strategis yang berpotensi memberikan dampak multiplikasi (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Arsyad dkk., 2025; Luthfi dkk., 2025; Aji, 2025; Setyawan dkk., 2025; Malau dkk., 2025). Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini secara optimal, disertai komitmen kuat terhadap reformasi struktural dan peningkatan literasi politik masyarakat, Indonesia memiliki prospek yang sangat baik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan (Siddiq, 2025; Harefa, 2025; Febriansyah dkk., 2025).

## KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur sistematis yang dilakukan terhadap berbagai publikasi ilmiah nasional, dapat disimpulkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan agenda strategis yang menuntut kombinasi kebijakan makroekonomi yang stabil, reformasi struktural yang komprehensif, serta komitmen kuat terhadap transformasi ekonomi berbasis hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (Harefa, 2025; Ilmi, 2025; Zaman, 2025). Literatur menunjukkan bahwa peluang pencapaian target ini sangat bergantung pada stabilitas makroekonomi yang terjaga dengan baik ditandai oleh inflasi terkendali, nilai tukar stabil, dan neraca pembayaran sehat serta keberhasilan dalam menarik investasi domestik dan asing yang berkualitas melalui perbaikan iklim investasi, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha (Siregar, 2025; Fitria, 2025; Ahmad dkk., 2025). Di sisi lain, risiko utama yang diidentifikasi meliputi tantangan struktural berupa ketimpangan ekonomi antarwilayah,

birokrasi yang masih kompleks dan kurang efisien, kualitas SDM yang belum optimal, serta daya saing industri nasional yang stagnan akibat ketergantungan pada ekspor komoditas primer dan lemahnya inovasi teknologi (Pradana dkk., 2025; Rosi & Rizal, 2025; Mariana, 2025). Prospek strategi ekonomi era Prabowo menunjukkan hasil yang cukup positif pada tahap awal dengan capaian pertumbuhan di atas 5%, namun untuk mencapai target 8% secara konsisten memerlukan akselerasi implementasi program prioritas seperti hilirisasi industri, Brigade Pangan dan JARI TANGAN untuk ketahanan pangan, makan bergizi gratis untuk mengatasi stunting, serta pemberdayaan masyarakat lokal yang berorientasi pada kemandirian ekonomi (Arsyad dkk., 2025; Luthfi dkk., 2025; Aji, 2025; Malau dkk., 2025; Setyawan dkk., 2025).

Temuan dari tinjauan literatur ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan bagi pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, efisiensi belanja APBN harus terus ditingkatkan melalui implementasi konsisten Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan memastikan setiap rupiah anggaran dialokasikan secara produktif dan tepat sasaran untuk sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak multiplikasi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Suwandi & Abdullah, 2025; Pramesti dkk., 2025). Kedua, reformasi struktural harus dipercepat, terutama dalam hal penyederhanaan birokrasi, digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri, serta pembangunan infrastruktur perdesaan yang merata untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah (Pradana dkk., 2025; Rosi & Rizal, 2025). Ketiga, strategi hilirisasi industri harus diimplementasikan dengan pendekatan yang seimbang antara kedaulatan nasional atas sumber daya alam dan komitmen perdagangan internasional, disertai penguatan ekosistem inovasi dan fasilitasi akses permodalan bagi UMKM (Zaman, 2025; Zikri & Albeta, 2025). Keempat, program ketahanan pangan dan energi perlu diperkuat melalui koordinasi lintas sektor yang lebih efektif, peningkatan akses teknologi dan modal bagi petani, serta pengembangan agro-industri yang terintegrasi dengan pertanian berkelanjutan (Ahmad, 2025; Arsyad dkk., 2025; Luthfi dkk., 2025). Kelima, penguatan literasi politik masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan dan alokasi anggaran, sehingga dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah dan efektivitas pembangunan dalam jangka panjang (Siddiq, 2025; Silalahi & Athahirah, 2025). Dengan implementasi rekomendasi ini secara konsisten dan terkoordinasi, prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% menjadi semakin realistis dan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 (Harefa, 2025; Febriansyah dkk., 2025; Setyawan dkk., 2025).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Alwi, S., & Nuddin, N. (2025). Hubungan Investasi Domestik dan Asing terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi-Provinsi Indonesia: Analisis Data Panel. *JEP (Jurnal Ekonomi Pembangunan)*, 15(1), 1200-1207.
- Ahmad, N. (2025). DINAMIKA POLITIK KETATANEGARAAN DALAM TRANSFORMASI PANGAN DAN ENERGI. *ANDREW Law Journal*, 4(1), 314-422.
- Aji, WT (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1 (3), 215-226.
- Arsyad, M., Sulaiman, A. A., Nuddin, A., Jamil, M. H., Bahrin, A. H., & Al Afgani, J. (2025). Menakar Tantangan Brigade Pangan dalam Mewujudkan Swasembada Pangan. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 20(2), 95-108.

- Ciptadi, A. M. (2025). PENGARUH INTERACTION ACTIVITIES, ENGAGING CONTENT, DAN ENDORSEMENT DI INSTAGRAM DALAM MENINGKATKAN BRAND AWARENESS CARL & CLAIRE DI JABODETABEK. *Jurnal Nusa Manajemen*, 2(2), 132-152.
- Febriansyah, M. I., Putra, A. K. S., Rafii, M. T., & Pangestoeti, W. (2025). Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Utang Publik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1), 632-640.
- Fitria, S. R. N. (2025). Analisis Determinan Neraca Transaksi Berjalan di Indonesia. *Journal of Development Economic and Digitalization*, 4(2), 19-34.
- Harefa, M. UPAYA PENCAPAIAN TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 8 PERSEN. *PARLIAMENTARY*, 11.
- Ilmi, R. G. (2025). Evaluasi Peran Perjanjian Perdagangan Internasional, Penyesuaian Kebijakan Moneter, Dan Inovasi Teknologi Dalam Mendorong Stabilitas Makroekonomi Dan Pertumbuhan Inklusif Di Negara Berkembang. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, 2(5), 1-6.
- Luthfi, W., Darmawan, D., Fatimah, W. N. A., & Nafilah, I. S. (2025). Sinergi Ketahanan Pangan dan Energi: Peran Program JARI TANGAN dalam Pengembangan Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(2), 981-990.
- Malau, T. P., Rochaeni, A., & Nuradhawati, R. (2025). EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BOGOR. *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 86-99.
- Mariana, W. I. (2025). GELOMBANG PHK SEBAGAI ANCAMAN NYATA TERHADAP PENINGKATAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA. *Al-Hasyimiyah*, 4(1), 26-41.
- Pieris, J. (2025). *Tragedi Maluku: sebuah krisis peradaban: analisis kritis aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Pradana, F. A., Febriansyah, V., & Wildan, M. A. (2025). Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Daya Saing Perusahaan: Studi Kasus PT Matahari Department Store Cabang Bangkalan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 3592-3599.
- Pramesti, R. F., Firdaus, A. A., Yulita, K., & Thoyyibah, M. (2025). ANALISIS EFISIENSI APBN ERA PRABOWO: KAJIAN EKONOMI DAN ANALISIS SENTIMEN PUBLIK. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(2), 1147-1161.
- Rosi, H., & Rizal, A. (2025). Analisis Kurangnya Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Bakau Kecil Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Al-Astar*, 4(2), 14-29.
- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., Santoso, M. H., & Kalalo, R. R. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494-1503.
- Siddiq, M. M. R. (2025). Literasi politik rendah cerminan rapuhnya fondasi demokrasi: Tantangan dan hambatan pendidikan politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik*.
- Silalahi, G. Q. D., & Athahirah, A. U. (2025). *LITERASI POLITIK MASYARAKAT TRANSISI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA* (Doctoral dissertation, IPDN).

- Siregar, T. M. (2025). *Efektivitas Kebijakan dalam Stabilitas Makroekonomi di Indonesia: Analisis Shock Kebijakan Fiskal dan Moneter* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Suwandi, S., & Abdullah, B. (2025). ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN INPRES NOMOR I TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Penelitian Sekretariat DPRD Kota Binjai). *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 4(1), 1-5.
- Syaripudin, M. A., Rojiati, U., & Mulyadi, A. S. (2025). KREDIBILITAS KOMUNIKASI PENYULUH KB DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM CAPAIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 42-51.
- Wahtan, A., Hayat, N., & Sumarni, S. (2025). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 363-381.
- Zaman, M. N. U. (2025). IMPLEMENTASI ECONOMIC ANALYSIS OF LAW DALAM PENGATURAN HILIRISISASI INDONESIA: ANTARA PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(1).
- Zikri, M. L., & Albeta, F. R. (2025). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 2930-2936.